

## Perencanaan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Barid Balighul Haqqi<sup>1</sup>, Moh Roziq Haikal Hidayatullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: [baridhaqqi2@gmail.com](mailto:baridhaqqi2@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhmmmdroziickhaikal@gmail.com](mailto:mhmmmdroziickhaikal@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 25 November 2025

Revised: 16 Februari 2026

Accepted: 05 Maret 2026

**Keywords:** : *planning the use of Village Funds, infrastructure development, obstacles faced in planning the use of Village Funds for infrastructure development in Ngadirejo Village.*

**Abstract:** *This study aims to analyze the planning process for the use of Village Funds in infrastructure development at the village level and assess the role of village officials and institutions in determining development priorities. This study uses a qualitative approach with a case study method through in-depth interviews, observations, and a review of village planning documents. The results show that the planning process progresses through the stages of identifying community needs, village deliberations, setting priorities, and preparing official documents such as the Village Work Plan (RKPDes) and Village Budget (APBDes). Village officials, the Village Consultative Body (BPD), and village facilitators play a strategic role in directing the planning process to align with community needs and regulatory requirements. However, planning effectiveness is still influenced by the level of community participation, the capacity of village officials, and the availability of supporting data. Overall, planning for the use of Village Funds contributes significantly to improving the quality of infrastructure development, especially when carried out in a transparent, participatory manner and based on the real needs of the community.*

### PENDAHULUAN

Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Desa dalam jumlah yang besar sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan yang berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan dana tersebut. Tantangan seperti terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi teknis, kurang optimalnya transparansi dalam proses pengelolaan anggaran, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan pembangunan kerap menjadi hambatan yang signifikan. Kondisi ini dapat menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata warga desa.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan desa, proses perencanaan memegang peranan yang sangat penting. Perencanaan yang baik dapat memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan, mempertimbangkan aspek teknis, serta memberikan dampak jangka panjang terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, berbagai hambatan administratif, teknis, maupun sosial kerap menyebabkan

pembangunan infrastruktur tidak berjalan secara optimal, baik dari segi kualitas, keberlanjutan, maupun pemanfaatannya.

Desa Ngadirejo merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa setiap tahunnya dan melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, efektivitas perencanaan penggunaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di desa tersebut masih perlu ditelaah lebih mendalam. Hal ini penting mengingat perencanaan merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas, penganggaran, hingga mekanisme pelaksanaan dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana proses perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ngadirejo. Fokus penelitian tidak hanya pada bagaimana perencanaan disusun, tetapi juga pada kendala yang dihadapi serta sejauh mana perencanaan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan memahami proses ini secara komprehensif, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola perencanaan Dana Desa di tingkat desa.

## **LANDASAN TEORI**

Perencanaan merupakan proses yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan dalam menetapkan capaian pembangunan yang ingin diraih oleh suatu daerah atau organisasi. Proses perencanaan dimulai dari perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga setiap langkah yang diambil dapat terarah pada pencapaian target pembangunan yang telah ditentukan (Amrin et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan desa, perencanaan berfungsi sebagai pedoman penting untuk mengarahkan penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada penyusunan program, tetapi juga mencakup proses identifikasi kebutuhan, analisis kondisi desa, penentuan prioritas, hingga penyusunan rencana kegiatan yang partisipatif. Penggunaan Dana Desa harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendesa PDPT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Infrastruktur desa, seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, drainase, fasilitas air bersih, dan sarana publik lainnya, merupakan salah satu prioritas utama pembangunan desa. Perencanaan yang baik menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan aksesibilitas, menunjang ekonomi lokal, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat.

Proses perencanaan, peran perangkat desa dan lembaga desa sangat krusial. Perangkat desa berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, sementara lembaga desa seperti BPD berperan dalam memberikan persetujuan, pengawasan, dan memastikan bahwa proses perencanaan telah melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat melalui Musyawarah Desa menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kebutuhan riil warga.

Dengan demikian, perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur merupakan rangkaian proses strategis yang mengintegrasikan analisis kebutuhan, keterlibatan lembaga desa, dan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan keputusan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan desa.

Pelaksanaan perencanaan penggunaan Dana Desa, berbagai hambatan sering muncul dan mempengaruhi kualitas perencanaan infrastruktur yang dihasilkan. Beberapa kendala yang umum ditemui antara lain: Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas, terutama dalam

memahami ketentuan teknis Dana Desa serta tahapan perencanaan yang sesuai prosedur. Kurangnya ketersediaan data yang akurat, sehingga penyusunan rencana pembangunan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Kerja sama antar lembaga desa yang belum optimal, yang berdampak pada pelaksanaan musyawarah desa yang kurang efektif. Faktor eksternal, seperti penyesuaian dengan prioritas pemerintah pusat dan dinamika politik tingkat lokal, yang dapat mempengaruhi arah perencanaan. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan proses perencanaan infrastruktur tidak selalu sesuai dengan kebutuhan warga, membuat alokasi anggaran kurang tepat sasaran, serta berisiko menghasilkan pembangunan fisik yang kualitasnya tidak maksimal. Mengintegrasikan (Robbins & Coulter, 2016) dan (Ghazi et al., 2024), hambatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan perlu dianalisis secara sistematis. Ketika desa mampu mengenali serta mengelola hambatan tersebut, maka perencanaan penggunaan Dana Desa dapat disusun secara lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada teori perencanaan (Amrin et al., 2023), perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat dipahami sebagai proses yang: dimulai dengan perumusan tujuan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, dilakukan melalui tahapan sistematis seperti identifikasi kebutuhan dan musyawarah, diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang terukur, dan berkelanjutan karena memperhitungkan manfaat jangka panjang infrastruktur desa. Dengan demikian, efektivitas pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga pendukungnya. Teori pertama yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Teori Pembangunan Infrastruktur yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam kajian pembangunan ekonomi. Menurut mereka, infrastruktur memiliki peran fundamental sebagai prasyarat dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Todaro & Smith, 2015).

Infrastruktur, dalam pandangan Todaro dan Smith, tidak hanya dipahami sebagai fasilitas fisik semata, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, melainkan juga sebagai sarana penting yang mempermudah aktivitas sosial-ekonomi masyarakat serta membuka akses terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tergantung pada tiga aspek penting. Pertama, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sebuah proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, akan berdampak positif hanya apabila dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, teori ini juga menekankan pentingnya kualitas fisik hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun dengan material yang buruk, tanpa standar teknis yang memadai, atau dikerjakan secara asal-asalan akan menyebabkan penurunan manfaat secara signifikan, bahkan membahayakan keselamatan pengguna. Ketiga, keberlanjutan pemanfaatan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, infrastruktur yang dibangun tidak hanya harus digunakan secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, persepsi, dan realitas sosial masyarakat serta aparat desa secara menyeluruh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Studi kasus merupakan analisis mendalam mengenai “sistem

yang terbatas” atau “suatu kasus/berbagai kasus” dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks tertentu (Creswell, 2013).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek utama. Pertama, proses perencanaan penggunaan Dana Desa yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, musyawarah perencanaan, penetapan prioritas pembangunan, serta penyusunan dokumen perencanaan desa. Kedua, kualitas pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, dilihat dari kesesuaian rencana dengan kebutuhan masyarakat, kualitas fisik bangunan, manfaat yang dirasakan, dan keberlanjutan pemanfaatannya. Ketiga, penelitian berupaya memahami hubungan antara proses perencanaan Dana Desa dan kualitas infrastruktur yang dihasilkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci seperti sekretaris desa, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat pembangunan jalan. Wawancara bertujuan menggali persepsi, pengalaman, serta praktik nyata yang terjadi dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa. Observasi dilakukan langsung di lapangan untuk melihat kondisi fisik infrastruktur seperti jalan desa dan fasilitas umum yang direncanakan melalui Dana Desa. Selain itu, observasi mencakup pelaksanaan musyawarah desa, proses penyusunan prioritas pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga peneliti dapat membandingkan dokumen perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan.

### **Gambaran Umum Desa Ngadirejo**

Desa Ngadirejo merupakan sebuah wilayah di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang dikenal luas sebagai salah satu lumbung pangan andalan berkat karakteristik geografisnya yang subur. Terletak di dataran rendah sebelah timur pusat pemerintahan kabupaten, lanskap desa ini didominasi oleh hamparan persawahan dan lahan pertanian produktif. Keberadaan jalur jalan utama yang melintasi desa menghubungkan berbagai kecamatan, memberikan keuntungan aksesibilitas transportasi yang vital bagi kelancaran roda ekonomi lokal.

Sektor agraris menjadi tulang punggung perekonomian desa, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidup sebagai petani padi, jagung, dan palawija. Selain pertanian, dinamika ekonomi desa turut didorong oleh geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai berkembang, meliputi industri makanan ringan, kerajinan, hingga pengolahan hasil bumi. Secara sosiologis, masyarakat Ngadirejo dikenal memiliki karakter agamis dan guyub, dengan nilai-nilai gotong royong yang terekam kuat dalam aktivitas sosial maupun keagamaan sehari-hari.

Tata kelola pembangunan desa, khususnya terkait pemanfaatan Dana Desa, aspek partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai pilar utama. Proses perencanaan pembangunan tidak berjalan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan representasi luas, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga kelompok tani. Pendekatan inklusif ini bertujuan memastikan setiap program yang dicanangkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta benar-benar merefleksikan kebutuhan warga demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mengingat corak ekonomi desa yang sangat agraris, arah kebijakan pembangunan infrastruktur pun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan sektor pertanian. Aspirasi masyarakat yang dominan kerap berkaitan dengan fasilitas penunjang ekonomi, seperti perbaikan saluran irigasi dan pembangunan jalan usaha tani. Pemerintah desa kemudian menyinergikan usulan arus bawah ini

dengan regulasi prioritas dari kementerian, yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi desa dan penguatan infrastruktur dasar.

Ekosistem pembangunan di Desa Ngadirejo, proses perencanaan infrastruktur dijalankan melalui kerangka kerja yang sistematis dan berjenjang. Pemerintah desa memposisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai landasan yuridis dan operasional yang bersifat mutlak; artinya, setiap rupiah dari Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik harus memiliki benang merah yang jelas dengan visi strategis dokumen tersebut. Pendekatan yang diadopsi tidak bersifat top-down, melainkan *bottom-up* dengan menempatkan partisipasi publik sebagai elemen kunci. Forum musyawarah desa (Musdes) menjadi arena dialektika yang melibatkan representasi sosiologis desa mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga kelompok tani dan Karang Taruna guna memastikan bahwa program yang dicanangkan benar-benar merepresentasikan keadilan dan kesejahteraan kolektif.

Aspirasi yang muncul dari arus bawah kemudian melewati proses filterisasi berdasarkan skala prioritas. Preferensi diberikan kepada usulan yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aspek sosial dan ekonomi, sembari tetap menyelaraskan diri dengan regulasi supra-desa, seperti Permendesa terkait prioritas penggunaan dana untuk pemulihan ekonomi nasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usulan warga sangat kental dengan nuansa pragmatisme ekonomi, di mana perbaikan jalan usaha tani dan irigasi menjadi aspirasi yang paling dominan. Guna meminimalisir kegagalan perencanaan, pemerintah desa melakukan studi kelayakan melalui survei lokasi awal untuk memastikan kalkulasi anggaran mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional. Selain itu, formulasi sasaran pembangunan disusun secara spesifik dan operasional agar capaian kinerjanya dapat diukur secara objektif, sehingga desa meyakini bahwa perencanaan ini adalah cerminan akurat dari suara masyarakat.

Beralih pada fase eksekusi, validitas pelaksanaan diukur dari konsistensi antara realisasi di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketersediaan material. Pemerintah Desa Ngadirejo berupaya mempertahankan kedisiplinan fiskal dengan menggunakan anggaran secara riil sesuai postur RKPDes dan APBDes. Prinsip efisiensi diterapkan melalui seleksi proyek yang memiliki rasio biaya-manfaat yang wajar, serta optimalisasi penggunaan material lokal untuk menjamin keberlanjutan manfaat jangka panjang.

Di sisi lain, dimensi pemberdayaan masyarakat terwujud dalam kebijakan padat karya tunai, di mana desa mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal khususnya tukang bangunan dalam setiap pengerjaan infrastruktur. Secara struktural, manajemen proyek dinilai telah berjalan di atas rel yang benar dengan pembagian tugas (Tupoksi) yang tegas antara elemen organisasi desa; misalnya, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan difokuskan penuh pada aspek eksekusi fisik, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan dapat direduksi.

Kendati demikian, harus diakui bahwa kapasitas teknis internal desa memiliki limitasi, terutama ketika menghadapi proyek dengan kompleksitas tinggi. Walaupun acuan standar dari Dinas Pekerjaan Umum telah tersedia, aparat desa kerap menghadapi kebingungan dalam menentukan spesifikasi teknis material dan perhitungan volume pekerjaan yang presisi. Konsekuensinya, untuk pengerjaan infrastruktur yang rumit, desa masih memiliki ketergantungan pada pendampingan teknis dan konsultasi dengan dinas terkait karena ketiadaan tenaga ahli spesifik di tingkat desa. Terkait fungsi kontrol, pengawasan saat ini masih melekat pada perangkat desa, meskipun terdapat wacana strategis untuk membentuk tim pengawas independen di masa depan.

Akuntabilitas publik di Desa Ngadirejo diterjemahkan melalui mekanisme transparansi yang ketat. Pemerintah desa membuka akses informasi seluas-luasnya dengan memasang papan informasi publik dan baliho yang merinci postur anggaran, volume fisik, hingga durasi pengerjaan

proyek. Lebih jauh lagi, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif, ringkasan realisasi APBDes dipublikasikan secara rutin, tidak hanya melalui media luar ruang tetapi juga disampaikan secara lisan dalam forum rapat desa. Dari sisi administrasi keuangan, kapasitas aparatur desa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD) menunjukkan tren positif berkat intensitas pelatihan yang diikuti, sehingga pelaporan dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah Desa Ngadirejo, proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti perwakilan RT/RW, tokoh agama, pemuda, kelompok tani, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Musyawarah tersebut menjadi ruang utama bagi warga untuk mengajukan kebutuhan dan usulan pembangunan. Pemerintah desa kemudian menyelaraskan seluruh usulan dengan dokumen RPJMDes sebagai pedoman jangka menengah dan RKPDes sebagai rencana tahunan. Penetapan program selalu mempertimbangkan dampaknya bagi ekonomi masyarakat, khususnya pembangunan jalan, saluran irigasi, dan fasilitas desa yang menunjang aktivitas pertanian sebagai mata pencaharian utama warga.

Partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, meskipun tingkat kehadiran berbeda-beda karena sebagian warga terkendala waktu kerja. Setiap usulan yang masuk tetap diverifikasi kembali melalui survei lapangan oleh aparatur desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan aktual. Pemerintah desa juga berpegang pada ketentuan prioritas dari Kementerian Desa, terutama pada aspek pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Transparansi anggaran diwujudkan melalui papan informasi dan baliho yang menunjukkan rincian kegiatan, volume pekerjaan, hingga waktu pelaksanaan. Laporan anggaran juga disampaikan secara terbuka dan diperbarui secara rutin agar masyarakat mengetahui penggunaan dana secara jelas.

Pelaksanaan pembangunan, sebagian besar kegiatan dinilai sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Tenaga kerja lokal dilibatkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun, belum tersedia kepanitiaan khusus untuk proyek infrastruktur sehingga sebagian besar tugas masih dipegang perangkat desa. Ke depan, desa merencanakan pembentukan tim khusus agar pelaksanaan lebih terstruktur. Pemerintah desa juga memastikan bahwa penggunaan Dana Desa tetap selaras dengan prioritas regulasi, terutama untuk infrastruktur, pemberdayaan, dan kebutuhan mendesak masyarakat. Administrasi pertanggungjawaban disusun secara berkala dan berupaya diselesaikan tepat waktu.

Terkait hambatan, beberapa kendala masih muncul dalam proses perencanaan. Salah satu hambatan utama adalah perubahan regulasi yang sering mendadak sehingga perencanaan harus direvisi di tengah jalannya pelaksanaan. Selain itu, keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa menjadi tantangan, terutama dalam penyusunan RAB, penentuan spesifikasi material, dan analisis teknis pembangunan. Desa juga masih membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli untuk program infrastruktur yang kompleks. Permasalahan lain muncul dari ketidaksinkronan antara rencana dan kondisi lapangan, misalnya kebutuhan material yang berubah atau akses lokasi yang sulit.

Di sisi lain, validitas data perencanaan kadang belum optimal meskipun desa melakukan musyawarah sebagai ajang validasi. Kendala cuaca, keterbatasan dana, dan heterogenitas usulan masyarakat juga mempengaruhi ketepatan sasaran pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perumusan sasaran masih cukup tinggi, tetapi keterbatasan waktu warga menjadi faktor penghambat peningkatan partisipasi. Dari aspek pengorganisasian, pembagian tugas perangkat

desa sebenarnya sudah jelas, namun beban kerja yang menumpuk membuat beberapa tugas masih saling tumpang tindih. Koordinasi antarperangkat desa umumnya berjalan baik tetapi sesekali mengalami hambatan ketika ada staf baru yang belum memahami tugasnya atau ketika terjadi molornya waktu pekerjaan.

Secara keseluruhan, penggunaan Dana Desa di Ngadirejo dinilai telah memberi manfaat signifikan, terutama dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, beberapa aspek seperti kompetensi aparatur, ketersediaan data yang lebih akurat, pembentukan tim infrastruktur khusus, dan penguatan koordinasi internal masih perlu ditingkatkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin efektif serta responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

Perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Ngadirejo dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain perwakilan RT/RW, tokoh agama, pemuda, kelompok tani, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Musdes berfungsi sebagai forum deliberatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan pembangunan secara terbuka. Dalam konteks desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, aspirasi yang dominan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, serta saluran irigasi yang mendukung kelancaran aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian.

Seluruh usulan yang disampaikan masyarakat tidak langsung ditetapkan sebagai program pembangunan, melainkan terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh aparatur desa. Verifikasi dilakukan melalui survei lapangan guna memastikan bahwa usulan tersebut sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan aktual masyarakat. Tahapan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menjaga validitas data perencanaan agar program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran. Usulan yang telah diverifikasi kemudian diselaraskan dengan dokumen RPJMDes sebagai pedoman pembangunan jangka menengah dan RKPDes sebagai rencana kerja tahunan desa. Praktik ini mencerminkan bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa tidak hanya bersifat responsif terhadap aspirasi warga, tetapi juga konsisten dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan desa.

Perencanaan yang diterapkan di Desa Ngadirejo menunjukkan karakteristik partisipatif, sistematis, dan terukur. (Amrin et al., 2023) bahwa perencanaan pembangunan yang efektif harus diawali dengan perumusan tujuan yang jelas, dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, serta melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, perencanaan Dana Desa di Ngadirejo dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dengan kerangka regulasi dan dokumen perencanaan desa guna menghasilkan program pembangunan infrastruktur yang relevan dan berkelanjutan.

### **Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

Tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Ngadirejo berupaya merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan. Disiplin terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan menjadi perhatian utama agar pembangunan berjalan efektif dan tidak menimbulkan pemborosan dana. Infrastruktur yang dibangun melalui Dana Desa, khususnya jalan desa dan irigasi, diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan melalui pemasangan papan informasi dan baliho anggaran yang memuat rincian kegiatan, volume pekerjaan, serta waktu pelaksanaan. Selain itu, pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui forum desa maupun media informasi lainnya. Upaya ini menunjukkan komitmen desa dalam membuka akses informasi publik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi secara langsung jalannya pembangunan.

Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat. Skema padat karya tidak hanya bertujuan mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi warga desa. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan fisik di lapangan dengan perencanaan awal. Praktik pengawasan ini sejalan dengan prinsip pengendalian organisasi yang menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2016).

### **Hambatan Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

Meskipun perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa di Desa Ngadirejo telah berjalan sesuai ketentuan, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas perencanaan. Salah satu kendala utama berasal dari perubahan regulasi pemerintah pusat yang kerap terjadi secara mendadak. Perubahan tersebut mengharuskan desa melakukan penyesuaian atau revisi perencanaan di tengah tahun berjalan, sehingga berpotensi mengganggu konsistensi program yang telah disusun.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa, terutama dalam penyusunan RAB, penentuan spesifikasi material, serta perhitungan volume pekerjaan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan desa masih bergantung pada pendamping desa atau tenaga ahli dari instansi terkait, khususnya untuk proyek infrastruktur yang bersifat kompleks. Selain itu, kualitas data pendukung perencanaan belum sepenuhnya optimal, meskipun telah dilakukan musyawarah desa sebagai sarana validasi aspirasi masyarakat.

Faktor eksternal seperti kondisi cuaca, keterbatasan anggaran, serta heterogenitas usulan masyarakat juga memengaruhi ketepatan sasaran pembangunan. Dari aspek organisasi, keterbatasan jumlah aparatur desa mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan terjadinya perangkapan tugas, sehingga koordinasi internal belum sepenuhnya optimal (Robbins dan Coulter, 2016) Menyatakan bahwa hambatan dalam organisasi sering kali bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi kerja.

### **Dampak Dana Desa terhadap Infrastruktur dan Ekonomi Desa**

Terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi, penggunaan Dana Desa di Desa Ngadirejo terbukti memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat. Pembangunan dan perbaikan jalan desa, jalan usaha tani, serta saluran irigasi telah meningkatkan aksesibilitas wilayah dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Infrastruktur yang lebih baik memungkinkan masyarakat menghemat waktu dan biaya transportasi, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien.

Dampak ekonomi juga dirasakan melalui pelibatan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan. Kebijakan ini memberikan kesempatan kerja tambahan bagi warga desa dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa. Pelaporan keuangan yang lebih tertib dan tepat waktu menunjukkan adanya perbaikan kapasitas administrasi aparatur desa.

Secara konseptual, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Todaro dan Smith, 2015). Dengan demikian, Dana Desa di Ngadirejo tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. Adapun beberapa faktor yang berperan penting dalam perencanaan yakni partisipasi sebagai fondasi perencanaan yang efektif, kesesuaian dengan regulasi dan dokumen perencanaan, pengaruh kapasitas aparatur terhadap kualitas perencanaan, kekuatan monitoring dalam menjaga akuntabilitas, tantangan koordinasi dan keterbatasan SDM.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ngadirejo telah dilaksanakan melalui mekanisme yang partisipatif, sistematis, dan mengacu pada dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa memberi kontribusi penting dalam memastikan bahwa program pembangunan terutama infrastruktur jalan dan irigasiselaras dengan kebutuhan ekonomi warga. memperkuat teori perencanaan (Amrin et al., 2023) yang menekankan pentingnya tujuan pembangunan yang jelas, terukur, dan disusun melalui proses yang kolaboratif.

Secara umum, pembangunan infrastruktur yang didanai melalui Dana Desa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat, sebagaimana ditegaskan Todaro & Smith bahwa infrastruktur yang memadai merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi pedesaan. Pemerintah desa juga telah menjaga akuntabilitas melalui transparansi anggaran, penggunaan tenaga kerja lokal, serta monitoring rutin sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas perencanaan, antara lain keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa, perubahan regulasi yang tiba-tiba, validitas data yang belum optimal, serta koordinasi internal yang belum sepenuhnya efektif. Hambatan-hambatan ini sesuai dengan (Robbins & Coulter, 2016). bahwa kendala organisasi sering muncul akibat keterbatasan SDM dan lemahnya alur koordinasi. Kurangnya acuan teknis dan minimnya tenaga ahli juga menjadikan desa bergantung pada pendampingan dari pihak eksternal.

Perbaikan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas data perencanaan, pembentukan tim teknis infrastruktur, serta penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan Dana Desa di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amrin, K. M. M., Nurfurkon, A., & Mahmudah, M. (2023). Perencanaan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 12(1), 45–57.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, A., & Wicaksono, B. (2021). Evaluasi perencanaan Dana Desa terhadap pembangunan

- infrastruktur. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(3), 201–215.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Putri, L. D., & Kurniawan, R. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Governance*, 5(1), 33–48.
- Qinthara, A., & Sukarno, A. (2024). Analisis hambatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 112–125.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Pearson.
- Susanti, R., & Marzuki, I. (2020). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa: Sebuah analisis implementatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 87–99.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.